

BAB II

PENGUNGSI ROHINGYA DI KOTA LHOKSEUMAWE

Bab ini memaparkan gambaran umum mengenai dinamika sikap masyarakat Kota Lhokseumawe terhadap pengungsi Rohingya, sejarah kedatangan pengungsi Rohingya ke wilayah Aceh khususnya Kota Lhokseumawe, serta keterlibatan berbagai pihak, baik pemerintah maupun lembaga non-pemerintah, dalam penanganan pengungsi Rohingya. Secara keseluruhan, pembahasan dalam bab ini mencakup tiga bagian utama. Dalam bagian pertama penulis menjelaskan kondisi saat ini sikap masyarakat terhadap para pengungsi Rohingya di Kota Lhokseumawe dimana adanya pergeseran dari sikap solidaritas pada masa awal kedatangan menjadi perlawanan seiring berjalannya waktu. Dalam bagian kedua penulis menjelaskan latar belakang kedatangan para pengungsi Rohingya di Aceh, mulai dari kedatangan pertama para pengungsi Rohingya ke Aceh dan bagaimana gelombang berikutnya kemudian menyusul. Bagian ketiga mengidentifikasi peran pemerintah, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kota, serta lembaga non-pemerintah dan aktor lokal, dalam penanganan pengungsi Rohingya di Kota Lhokseumawe.

2.1 Pandangan Masyarakat Kota Lhokseumawe terhadap Pengungsi Rohingya

Pada periode awal kedatangannya di tahun 2020 sampai 2021, pengungsi Rohingya diterima oleh masyarakat Aceh, termasuk di Kota Lhokseumawe karena adanya rasa solidaritas. Solidaritas merupakan bentuk kesatuan yang dibangun atas dasar rasa senasib dan tanggung jawab kolektif terhadap kelompok lainnya yang diwujudkan dalam bentuk memberikan dukungan sosial (Ahdiyanti, 2018).

Solidaritas di antara para pengungsi Rohingya dapat diwujudkan dengan penerimaan, pemberian bantuan dan mendukung para pengungsi oleh masyarakat. Penerimaan tersebut tercermin melalui bantuan langsung yang diberikan warga kepada para pengungsi yang baru tiba. Salah seorang warga Lancok, Aples Fuari, menyampaikan bahwa masyarakat setempat turut memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan mereka, termasuk menyediakan makanan bagi para pengungsi yang baru tiba di pesisir Aceh Utara pada Juni 2020 (Surry, 2020).

Civitas akademis setempat juga telah menunjukkan solidaritasnya terhadap pengungsi Rohingya. Dalam Program Studi Hubungan Internasional yang melibatkan para akademisi dan mahasiswa telah menyelenggarakan kegiatan bantuan kemanusiaan bagi pengungsi Rohingya di Lhokseumawe. Kegiatan ini mencakup pemberian bantuan berupa alat kebersihan, perlengkapan pencegahan COVID-19, makanan, dan mainan anak-anak. Pelatihan keterampilan pembuatan kerajinan tangan bagi perempuan pengungsi, serta hiburan berupa pertunjukan seni budaya oleh sanggar Seni Cakra Donya (Novialdi *et al.*, 2021).

Memasuki periode 2022, sikap masyarakat terhadap keberadaan pengungsi Rohingya mulai menunjukkan perubahan. Berbeda dengan sikap awal yang cenderung menerima dan membantu, pada periode selanjutnya mulai terlihat berbagai bentuk resistensi dari sebagian masyarakat Aceh terhadap keberadaan pengungsi (Ilma *et al.*, 2024). Resistensi merujuk pada bentuk penolakan yang terwujud melalui sikap bertahan, menentang, hingga aksi oposisi terhadap keberadaan pihak lain (Saka *et al.*, 2025). Terjadi bentuk resistensi pada 25 November 2022 di bekas Kantor Imigrasi Lhokseumawe, yang menjadi lokasi

penampungan sementara di Desa Punteuet, Kecamatan Blang Mangat. Sehari sebelumnya, tepat pada 24 November 2022, beberapa warga berupaya menerobos masuk ke lokasi penampungan dengan merusak kunci pagar (Kompas, 2022).

Pada 8 Desember 2022 puluhan warga Desa Ulee Blang Mane, Kecamatan Blang Mangat melakukan unjuk rasa menolak para imigran Rohingya. Dengan mendesak Pemerintah Kota Lhokseumawe dan UNHCR untuk memindahkan para pengungsi Rohingya dari wilayah tersebut (AntaraNews, 2022). Penolakan tersebut terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya seiring dengan meningkatnya jumlah pengungsi Rohingya yang tiba di Aceh. Pada puncak arus kedatangan tahun 2023, bangunan bekas Kantor Imigrasi di Desa Punteuet, Kecamatan Blang Mangat, menjadi salah satu lokasi utama penampungan pengungsi Rohingya di Kota Lhokseumawe. Penolakan tersebut terus berlanjut hingga akhir 2023, aparat kepolisian mencatat bahwa dalam rentang Desember 2023 hingga Internasional 2024 terjadi 21 aksi penolakan oleh warga dan mahasiswa terhadap pengungsi Rohingya di berbagai titik di Aceh (Mabes Polri, 2024). Yang menunjukkan bahwa intensitas resistensi pada periode ini jauh lebih tinggi dibandingkan gelombang penolakan pada tahun 2022.

Pada periode Desember 2023 juga mencatat sejumlah pengungsi yang kabur dari lokasi penampungan. Kapolres Lhokseumawe, AKBP Henki Ismanto, menyatakan bahwa pada awal Desember 2023 sebanyak 23 pengungsi Rohingya kabur dari bekas Kantor Imigrasi dalam dua gelombang, dengan cara merusak dinding kamar menuju kamar mandi wanita sebelum melompati pagar pembatas (CNN Internasional, 2023). Sehari kemudian, upaya pelarian oleh enam pengungsi

lain digagalkan aparat kepolisian, sehingga dalam kurun dua minggu tercatat total 30 orang yang meninggalkan lokasi penampungan tersebut (Tribun Jateng, 2023). Sejumlah warga lokal juga turut ditangkap kepolisian karena diduga membantu proses pelarian tersebut (Detik News, 2023). Pada periode yang sama, kondisi penampungan gedung bekas Kantor Imigrasi kian memprihatinkan karena telah melampaui kapasitas. Fasilitas yang idealnya menampung 220 orang tercatat dihuni oleh 492 pengungsi (Detik News, 2023).

Kemudian pada tahun 2024 saat Pemerintah Kota Lhokseumawe merencanakan untuk memindahkan para pengungsi ke beberapa desa di kecamatan Blang Mangat dan Muara Satu, masyarakat yang tinggal di wilayah tujuan pemindahan para pengungsi pun menyatakan ketidaksetujuan terhadap keputusan tersebut. Hingga 4 November 2024, tercatat sebanyak 227 pengungsi yang tinggal di bekas kantor imigrasi Lhokseumawe dimana terdapat 117 laki-laki dan 110 perempuan (Pemerintah Lhokseumawe, 2024).

2.2 Sejarah Kedatangan Pengungsi Rohingya di Aceh, Khususnya Kota Lhokseumawe

Etnis Rohingya merupakan kelompok minoritas Muslim yang telah mendiami wilayah Rakhine, Myanmar, selama berabad-abad, sekaligus turut membangun kehidupan sosial dan budaya di kawasan tersebut. Akar konflik yang berkaitan dengan keberadaan Etnis Rohingya dapat ditelusuri sejak masa kolonial Inggris (1824-1948). Pada masa itu pemerintah kolonial Inggris mendatangkan tenaga kerja dari wilayah Chittagong yang kini merupakan bagian dari Bangladesh, untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor pertanian karena minimnya

jumlah petani lokal di wilayah Rakhine. Menurut rencana semula para pekerja musiman tersebut seharusnya kembali ke daerah asal mereka setelah musim panen berakhir, namun mayoritas dari mereka justru memilih untuk menetap di Rakhine secara permanen. Mobilitas penduduk dalam jumlah besar inilah yang kemudian menjadi latar belakang pandangan pemerintah Myanmar pasca kemerdekaan, dan menganggap Rohingya sebagai pendatang ilegal dari Bengal, bukan penduduk asli dengan hak historis atas Rakhine (Edu, 2023)

Setelah Myanmar memperoleh kemerdekaan, posisi Etnis Rohingya semakin terpinggirkan dalam struktur sosial-politik Myanmar. Terutama sejak berkuasanya rezim Ne Win pada 1962 dan mencapai titik penting pada tahun 1982, ketika Myanmar mengesahkan Undang-Undang Kewarganegaraan yang tidak mengakui Rohingya sebagai salah satu kelompok etnis yang diakui secara resmi. Sehingga sebagian besar dari mereka kehilangan hak kewarganegaraan dan terjebak dalam kondisi tanpa status kewarganegaraan (*stateless*). Kebijakan ini turut membatasi akses mereka terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, hingga kebebasan berpindah tempat (Surya *et al.*, 2026). Sekaligus menghasilkan berbagai kendala administratif struktural bagi kelompok yang tidak termasuk dalam kategori ras nasional yang diakui negara (Burmese Rohingya Organisation UK, 2014).

Peristiwa tersebut memicu gelombang kekerasan dan pengungsian yang memaksa masyarakat Rohingya meninggalkan tanah kelahiran mereka, sejak operasi militer di Rakhine pada akhir 1970-an hingga mencapai puncaknya pada 2017, ketika lebih dari 700.000 orang Rohingya melarikan diri ke Bangladesh

dalam salah satu krisis pengungsi terbesar di kawasan. Sebagian besar bertahan di kawasan Cox's Bazar dengan kondisi serba terbatas, sementara sebagian lainnya melanjutkan perjalanan berbahaya melalui jalur laut menuju negara-negara Asia Tenggara, termasuk Internasional (Surya *et al.*, 2026).

Kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh telah berlangsung sejak Internasional 2009, ditandai dengan pendaratan kelompok pertama tiba di Sabang yang kemudian dikenal sebagai Manusia Perahu (Safina, 2024). Pada awal kedatangannya, masyarakat Aceh umumnya menunjukkan sikap positif dan penuh empati terhadap pengungsi Rohingya, yang tercermin dalam berbagai bentuk solidaritas dan bantuan kemanusiaan (Karim & Zakia, 2025). Selanjutnya, gelombang kedatangan pengungsi Rohingya dalam jumlah lebih besar kembali terjadi pada tahun 2015, ketika ratusan pengungsi Rohingya ditemukan terombang-ambing di perairan Aceh dan berhasil diselamatkan oleh para nelayan setempat, sementara pemerintah Internasional, Malaysia, dan Thailand awalnya menolak memberikan izin pendaratan (Karim & Zakia, 2025). Mereka awalnya ditampung di meunasah, sebelum dipindahkan ke sebuah gudang di dekat Lhokseumawe yang dialihfungsikan sebagai penampungan sementara. Di Aceh Utara, 329 pengungsi yang sebelumnya ditampung di TPI Kuala Cangkoi kemudian dipindahkan ke Desa Blang Adoe pada Juni 2015 menyusul kedatangan gelombang berikutnya pada 12 Agustus, dengan lokasi tersebut dipersiapkan sebagai penampungan yang lebih permanen (Hidayatullah & Novialdi, 2023).

Setelah gelombang besar pada tahun 2015, kedatangan pengungsi Rohingya ke Aceh terus berlanjut meskipun dalam jumlah relatif kecil. Pada April 2018

kembali ditemukan lima imigran Rohingya yang terdampar di perairan Aceh Timur kemudian dibawa ke Pelabuhan Kuala Idi untuk pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut sebelum mereka diserahkan kepada pihak berwenang (Karim & Zakia, 2025). Kasus ini menunjukkan bahwa perjalanan laut masih merupakan salah satu cara yang digunakan pengungsi Rohingya untuk mencapai Aceh. Pada tahun 2020, Kota Lhokseumawe kembali menerima kedatangan dalam jumlah yang cukup besar. Pada 25 Juni 2020, sebanyak 99 pengungsi Rohingya ditemukan berada di Pantai Lancok, Kota Lhokseumawe, setelah sebelumnya mengalami berbagai kendala selama menempuh perjalanan melalui jalur laut. Para pengungsi tersebut kemudian diselamatkan dan dibawa menuju pusat kota guna mendapatkan penanganan lebih lanjut. Mereka sempat ditempatkan terlebih dahulu di bekas Kantor Imigrasi Lhokseumawe sebelum akhirnya dipindahkan ke Balai Latihan Kerja (BLK) yang berlokasi di Meunasah Mee. Penanganan terhadap kelompok tersebut berlangsung dengan mempertimbangkan kondisi pandemi COVID-19, termasuk penerapan protokol kesehatan.

Kedatangan berikutnya terjadi pada 27 September 2020 ketika 297 imigran Rohingya tiba di pantai Ujong Blang, Kota Lhokseumawe. Setelah menjalani proses pengumpulan data dan pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari penanganan selama pandemi, para pengungsi diakomodasi di BLK Lhokseumawe. Dari semua individu tersebut, tercatat 181 merupakan perempuan, 102 laki-laki, dan 14 anak-anak. Kedua kedatangan ini menyebabkan naiknya jumlah pengungsi yang berada di Lhokseumawe hingga hampir 396 orang. Namun, jumlah tersebut kemudian menurun setelah beberapa waktu. Hingga pada Internasional 2021 hanya sebanyak

103 pengungsi yang masih berada di Lhokseumawe, sementara pengungsi lainnya telah meninggalkan lokasi penampungan (Detik News, 2021).

Memasuki periode 2022-2024, kedatangan pengungsi Rohingya ke Lhokseumawe kembali terjadi dalam beberapa gelombang. Pada 2022, sejumlah pengungsi ditempatkan di bekas Kantor Imigrasi Lhokseumawe di Desa Punteuet, Kecamatan Blang Mangat. Salah satu kelompok yang datang pada November 2022 berjumlah 110 orang dan akhirnya ditampung di tempat tersebut. Kedatangan tersebut merupakan bagian dari rangkaian panjang arus pengungsi Rohingya yang terus berlangsung di Lhokseumawe hingga periode-periode berikutnya. Seiring dengan berlanjutnya kedatangan pengungsi, reaksi dari masyarakat mulai menunjukkan perbedaan. Di satu sisi, sebagian masyarakat masih mempertahankan sikap semangat persatuan dan menekankan pentingnya memberikan perlindungan kepada pengungsi. Namun di sisi lain, kritik terhadap keberadaan pengungsi Rohingya mulai muncul dan berkembang. Beberapa masyarakat berpendapat bahwa pengungsi Rohingya telah tinggal di lokasi penampungan dalam waktu yang cukup lama tanpa menemukan solusi permanen (Adami, 2025).

Sejak awal November hingga Desember 2023 sebanyak 1.887 pengungsi Rohingya telah mendarat di beberapa pantai di Provinsi Aceh sebagian diantaranya turut menambah jumlah pengungsi yang ditampung di Kota Lhokseumawe (Veronika & Tricesaria, 2023). Peningkatan jumlah kedatangan tersebut menyebabkan situasi tempat penampungan di Lhokseumawe turut melampaui kapasitasnya, sejalan dengan kondisi serupa yang terjadi di beberapa wilayah lain di Aceh. Secara keseluruhan, hingga tahun 2024 Aceh telah mencatat 41 gelombang

kedatangan kapal pengungsi Rohingya dengan total 6.150 orang, dengan Kota Lhokseumawe menjadi salah satu wilayah penampungan utama sepanjang periode tersebut (Safina, 2024).

Dengan demikian, kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh telah berlangsung secara bertahap sejak tahun 2009 dan terus berlanjut melalui beberapa gelombang sampai tahun 2022-2024. Kota Lhokseumawe menjadi satu wilayah yang beberapa kali menerima kedatangan sekaligus menjadi tempat penampungan pengungsi Rohingya. Rangkaian kedatangan tersebut kemudian membentuk keberadaan pengungsi Rohingya yang berlangsung dalam jangka panjang di Kota Lhokseumawe.

Memasuki periode setelah tahun 2024, Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe, T Adnan, meninjau sejumlah calon lokasi penampungan baru pada November 2024, yaitu *Gampong* Jeulikat, *Gampong* Alue Lim, dan *Gampong* Blang Panyang, namun warga di lokasi-lokasi tersebut menyatakan penolakan terhadap rencana tersebut (Kompas.com, 2024). Setelah proses peninjauan lebih lanjut, Pemerintah Kota Lhokseumawe akhirnya menetapkan *Gampong* Masjid Punteuet, Kecamatan Blang Mangat, sebagai lokasi *shelter* baru, dengan rencana pemindahan pada pertengahan Mei 2026 (AJNN, 2026). Rencana tersebut terealisasi pada 25 Juni 2026, ketika sebanyak 28 pengungsi Rohingya terdiri atas 15 laki-laki dan 13 perempuan dipindahkan dari bekas Kantor Imigrasi ke *shelter* baru yang berjarak sekitar 10 kilometer dari Jalan Medan-Banda Aceh (Portalsatu, 2026). *Shelter* tersebut dibangun oleh IOM bersama Jesuit Refugee Service (JRS) di atas lahan seluas kurang lebih 3 hektare yang dipinjamkan oleh pihak dayah

setempat, dan telah dilengkapi klinik, sarana MCK, serta asrama (Serambinews, 2026).

2.3 Peran Berbagai Pihak dalam Penanganan Pengungsi Rohingya di Kota Lhokseumawe

Penanganan terhadap pengungsi Rohingya di Aceh khususnya di Kota Lhokseumawe, tentu saja tidak terlepas dari keterlibatan sejumlah pihak termasuk pemerintah, aparat keamanan, organisasi internasional, hingga pemangku kepentingan lokal. Keterlibatan tersebut meliputi beberapa aspek seperti pengumpulan data, penempatan, penyediaan fasilitas penampungan, pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan Kesehatan, dan keamanan. Pemerintah Pusat merupakan salah satu pemangku kepentingan yang telah terlibat dalam penanganan pengungsi Rohingya di Aceh, khususnya di Kota Lhokseumawe, melalui kebijakan dan kesepakatan administratif mengenai penempatan dan penanganan pengungsi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia secara resmi telah menyetujui penggunaan kantor bekas Imigrasi Lhokseumawe sebagai tempat penampungan sementara bagi pengungsi pada tahun 2022 (Akhyar, 2022). Sebagai unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi, kantor Imigrasi kelas II TPI Lhokseumawe juga turut terlibat dalam penanganan pengungsi sepanjang periode 2015 hingga 2022, termasuk pelaporan kasus keamanan yang terjadi di tempat penampungan (Hidayatullah & Novialdi, 2023). Sementara itu, Kementerian Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan juga memiliki tanggung jawab sendiri dalam menangani pengungsi di Lhokseumawe, salah satunya dilakukan melalui

surat permohonan pemindahan pengungsi dari kantor bekas Imigrasi Lhokseumawe pada tahun 2024 (Fakhrurrazi, 2024).

Aparat keamanan juga terlibat dalam penanganan pengungsi Rohingya di Aceh. TNI (Tentara Nasional Internasional) dan Polri (Polisi Republik Internasional) secara aktif terlibat dalam pengawasan wilayah perairan, penanganan kedatangan pengungsi, serta mengamankan pengungsi setelah ditempatkan di wilayah daratan. TNI Angkatan Laut melakukan patroli dan pengawasan di wilayah perairan serta terlibat dalam penanganan awal ketika kapal yang membawa pengungsi telah ditemukan. Sementara itu, aparat kepolisian menangani keamanan dan koordinasi dalam penanganan pengungsi bersama dengan pemerintah daerah, TNI, dan pihak yang terkait. Kedua satuan tersebut bertanggung jawab atas penanganan pengungsi Rohingya di Aceh, baik dalam bentuk pengamanan maupun koordinasi dengan pihak terkait (Hidayatullah & Novialdi, 2023). Pada tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Aceh sangat penting dalam mengoordinasikan penanganan pengungsi di seluruh wilayah Aceh. Kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Aceh berlandaskan pendekatan kemanusiaan meskipun dalam pelaksanaan penerapan kebijakan tersebut masih menghadapi kendala regulasi dan anggaran. Secara keseluruhan jumlah pengungsi yang ditampung di Aceh lebih dari 1.700 orang dan tersebar di beberapa wilayah seperti Aceh Utara, Kota Langsa, Aceh Timur, dan Aceh Tamiang. Pemerintah memanfaatkan beberapa fasilitas sebagai tempat penampungan pengungsi Rohingya. Termasuk bekas kantor imigrasi, Sanggar Kegiatan Belajar, dan kamp pramuka untuk menampung lebih dari 1.000 pengungsi baru. Keterbatasan anggaran daerah juga membuat pendanaan

untuk penanganan pengungsi bergantung pada anggaran sosial serta donasi masyarakat (Fajar, 2025).

Pemerintah Kota Lhokseumawe turut berperan dalam penanganan pengungsi Rohingya melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) yang bekerja sama dengan UNHCR untuk melakukan pendataan ulang, pendaftaran, dan verifikasi identitas para pengungsi (Candra, 2021). Dalam hal penyediaan tempat tinggal, pemerintah kota memindahkan para pengungsi dari Kantor Imigrasi ke Balai Latihan Kerja (BLK) setelah lokasi tersebut dilengkapi dengan fasilitas pendukung, seperti listrik, sanitasi, dan air bersih. Pemindahan dilakukan untuk menyediakan tempat tinggal sementara yang lebih layak bagi pengungsi. Sementara itu, dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, Pemerintah Kota Lhokseumawe menghadapi keterbatasan logistik sehingga sebagian kebutuhan pengungsi masih dipenuhi melalui bantuan masyarakat. Pemerintah Kota Lhokseumawe juga berkoordinasi dengan UNHCR dalam membahas keberlanjutan penanganan pengungsi, termasuk upaya mencari solusi jangka panjang melalui penempatan di negara ketiga maupun pemulangan (Candra, 2021).

Pemerintah Kota Lhokseumawe juga turut memenuhi kebutuhan kesehatan serta kebutuhan dasar para pengungsi Rohingya melalui kerja sama dengan berbagai pihak terkait. Pada saat kedatangan, Dinas Kesehatan bersama fasilitas layanan kesehatan daerah memberikan pertolongan awal bagi pengungsi yang memerlukan penanganan medis. Puskesmas Jomblang turut memberikan pertolongan pertama, sementara pemeriksaan lanjutan dilakukan melalui Puskesmas Kandang yang berada di sekitar lokasi penampungan. Layanan

kesehatan yang diberikan mencakup pemeriksaan terhadap pengungsi yang mengalami masalah kesehatan, kekurangan gizi, maupun cedera fisik, serta pemeriksaan dan karantina guna mengatasi masalah COVID-19. Selain memberikan layanan kesehatan, pemenuhan kebutuhan dasar bagi para pengungsi juga diberikan melalui bantuan logistik yang sebagian di antaranya berasal dari sumbangan masyarakat. Dinas Sosial pun turut terlibat dalam penyaluran bantuan sekaligus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk organisasi internasional (Zulkarnain, 2019). Selain itu Pemerintah Kota Lhokseumawe juga berkoordinasi dengan UNHCR dalam menangani para pengungsi, termasuk upaya mencari solusi jangka panjang melalui negara ketiga maupun pemindahan pengungsi (Hidayatullah & Novialdi, 2023).

Seiring dengan keterbatasan kapasitas tempat penampungan, Pemerintah Kota Lhokseumawe menyiapkan lahan untuk tempat penampungan baru di Desa Masjid Punteuet, Kecamatan Blang Mangat. Rencana tersebut mencakup pemindahan para pengungsi dari bekas kantor Imigrasi ke tempat penampungan baru dengan bantuan UNHCR dan IOM dalam pembangunan penampungan tersebut (Pemerintah Lhokseumawe, 2024). Untuk memastikan kebijakan relokasi berjalan efektif, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Lhokseumawe memfasilitasi rapat *hybrid* yang melibatkan berbagai lembaga terkait untuk membahas pelaksanaan pemindahan para pengungsi Rohingya (Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Lhokseumawe, 2026).

Organisasi internasional juga terlibat dalam menangani pengungsi Rohingya di Aceh khususnya di Kota Lhokseumawe. *United Nations High*

Commissioner for Refugees (UNHCR) terlibat dalam registrasi, verifikasi, penanganan perlindungan pengungsi, memberikan konseling psikososial dan menyelenggarakan program pemberdayaan para korban kekerasan seksual berbasis gender, serta perlindungan khusus bagi anak-anak termasuk skema pengasuhan (UNHCR Internasional, 2023). *Internasional Organization for Migration* (IOM) turut memberikan dukungan dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan penanganan pengungsi melalui kerja sama dengan Pemerintah Daerah (Primadi, 2019).

Penanganan pengungsi Rohingya di Aceh juga melibatkan aktor lokal, yaitu Panglima Laot dan para nelayan. Terutama pada tahap awal ketika pengungsi tiba melalui wilayah perairan Aceh. Panglima Laot merupakan lembaga adat yang berkedudukan di wilayah pesisir dan memiliki kaitan erat dengan pengelolaan kehidupan masyarakat nelayan, termasuk berbagai aktivitas di kawasan laut. Dalam praktiknya, nelayan yang menemukan pengungsi dan memberikan pertolongan pertama sekaligus melaporkannya kepada Panglima Laot setempat, yang kemudian meneruskan informasi tersebut kepada pihak berwenang (Tunnur *et al.*, 2025). Salah satu insiden yang menggambarkan hal tersebut adalah kedatangan di Seunuddon tahun 2020, ketika nelayan yang menemukan para pengungsi Rohingya di perairan setempat, mereka segera memberitahu Panglima Laot setempat. Setelah laporan tersebut diterima, para pengungsi kemudian dibawa ke daratan untuk memperoleh penanganan lebih lanjut (Kompas.com, 2020).

Secara keseluruhan penanganan para pengungsi Rohingya di Lhokseumawe melibatkan berbagai aktor dengan peran yang berbeda-beda. Mulai dari Pemerintah Pusat dan daerah, aparat keamanan, organisasi internasional, dan aktor lokal seperti

Panglima Laot dan para nelayan. Keterlibatan berbagai aktor tersebut mencakup penanganan kedatangan, penyediaan tempat penampungan, pemenuhan kebutuhan dasar dan penyediaan layanan kesehatan, pendataan, perlindungan, hingga koordinasi mengenai pemindahan pengungsi.

2.4 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab ini, keberadaan para pengungsi Rohingya di Kota Lhokseumawe menggambarkan dinamika hubungan yang berubah antara para pengungsi Rohingya dan masyarakat setempat. Pada awal kedatangannya tahun 2020, keberadaan pengungsi diikuti oleh berbagai bentuk solidaritas dan penerimaan dari masyarakat. Namun, pada perkembangan berikutnya, muncul berbagai bentuk penolakan yang terus berulang sejak 2022 hingga 2024. Beberapa bentuk penolakan tersebut terlihat melalui berbagai tindakan, seperti pemasangan spanduk penolakan, upaya memasuki lokasi pengungsian, dan aksi unjuk rasa. Perkembangan sikap tersebut telah menjadi bagian dinamika sosial yang menyertai keberadaan pengungsi Rohingya di Kota Lhokseumawe.

Keberadaan pengungsi Rohingya di Aceh telah berlangsung sejak tahun 2009 dan terus berlanjut melalui beberapa gelombang kedatangan. Kota Lhokseumawe merupakan salah satu wilayah di Aceh yang menerima kedatangan dan menjadi lokasi penampungan pengungsi Rohingya. Seiring berjalannya perkembangan tersebut, penanganan pengungsi mencakup penyediaan tempat penampungan, pemenuhan kebutuhan dasar dan kesehatan, pemberian bantuan, serta pengaturan dan pemindahan pengungsi ke lokasi penampungan yang tersedia.

Dalam proses penanganannya, keberadaan pengungsi Rohingya melibatkan berbagai pihak dengan peran yang berbeda-beda. Pemerintah Pusat berperan dalam pembuatan kebijakan dan persetujuan administratif terkait keberadaan pengungsi Rohingya. Pemerintah Aceh, di tingkat regional, berperan sebagai koordinator yang menjembatani kebijakan pusat dengan implementasi di lapangan. Pemerintah Kota Lhokseumawe berperan melalui penanganan pengungsi di tingkat lokal termasuk penyediaan tempat penampungan dan distribusi bantuan. Selain itu, UNHCR dan IOM turut terlibat dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan penanganan pengungsi, sementara aktor lokal seperti Panglima Laot dan nelayan juga memiliki keterlibatan dalam dinamika penanganan pengungsi di wilayah tersebut. Dengan demikian, bab ini menunjukkan perkembangan keberadaan pengungsi Rohingya di Kota Lhokseumawe, perubahan sikap masyarakat dari solidaritas menuju resistensi, serta keterlibatan berbagai pihak dalam penanganannya. Gambaran tersebut menjadi dasar bagi pembahasan lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pergeseran sikap masyarakat Kota Lhokseumawe terhadap pengungsi Rohingya.